

# Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa

I Nyoman Sudira

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

E-mail: belinyomanbagus@yahoo.com

**Abstrak:** Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah Vietnam dan Filipina. Akan tetapi, konflik ini pun mempengaruhi beberapa negara diluar kawasan Asia Tenggara yaitu Cina dan Amerika Serikat. Kawasan Laut Cina Selatan yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan beberapa negara membuat Laut Cina Selatan memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Cina. Dalam penulisan paper "Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa" ini pembahasan akan di fokuskan pada empat bagian. Diawali dengan pembahasan mengenai Amerika Serikat (AS) dan Konflik Laut Cina Selatan, kemudian diikuti pembahasan mengenai Uni Eropa dan Konflik Laut Cina Selatan. Pada bagian akhir akan disajikan dua bahasan yang berkaitan dengan Indonesia yakni: 'Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan'; serta sekaligus sebagai penutup, 'Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika dan Eropa Terkait Isu Laut Cina Selatan'.

**Kata kunci:** Laut Cina Selatan, Cina, Vietnam, Filipina, Amerika Serikat, Indonesia, Uni Eropa, Poitik Luar Negeri.

**Abstract:** Conflict which happen in South China Sea involve some countries in Southeast Asia Region. The countries are Vietnam and Philipines. However, this conflict affect some countries out of the region, there are China and United States of America. South Cina Sea Region is quite big and directly border with some countries. It makes South China Sea has a beneficial potential for United States of America and China. In this paper with the title "Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indoneisa ke Amerika dan Eropa" will be focused on four section. First is about United States of America and South China Sea Conflict then followed by European Union and South China Sea Conflict. In the end section will be explained two sections which related to Indonesia, there is Indonesia and South China Sea Conflict and last section is Republik Of Indonesia's Foreign poilcy related to South China Sea issue.

**Keyword:** South China Sea, China, Vietnam, Philipines, United States of America, Indonesia, European Union, Foreign Policy.

## Pendahuluan

Dalam konflik Laut Cina Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan hingga kini,<sup>71</sup> terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan Cina. Filipina misalnya telah memberikan

beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Cina yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli Cina dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya Cina juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina.

Sementara Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan Cina pada awal

<sup>71</sup> Leszek Buszynski, 2012. The South China Sea: Oil, Maritime Slaims, and U.S. – China Strategic Rivalry. The Washington Quaterly, Spring, 35: 2. hal. 139-156.

2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai Laut Cina Selatan. Sayang sekali beberapa perilaku Cina seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal Cina di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan Cina juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut Cina Selatan.

Kekhawatiran dan ketakutan yang akhirnya berkembang baik di Filipina dan di Vietnam akhirnya mendorong pemimpin keduanya untuk mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat (AS). Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh seorang Peneliti Senior di CSIS:

*Cina kalau tidak bisa menjaga sikap arogansinya akan melahirkan bumerang dan tentu saja nantinya akan sangat merugikan. Siapapun negara yang terlibat dalam Konflik Laut Cina Selatan selama merasakan adanya ancaman dari Cina pasti akan mencari payung keamanan dan pilihan mereka adalah Amerika.<sup>72</sup>*

Pernyataan diatas nampaknya mendapat pembenaran karena sikap yang dilakukan Cina selain semakin meningkatkan ketegangan di LCS, juga membuat negara

yang merasa terancam semakin mendekati diri dengan AS. Vietnam misalnya sudah mulai merangkul AS dengan melakukan pernyataan bersama pada 17 Juni 2011 mengenai pentingnya kebebasan pelayaran. Sementara Filipina secara ekplisit telah mendeklarasikan bahwa mereka akan memohon bantuan kepada AS selama mereka mengalami ancaman dari perilaku Cina yang sangat agresif.<sup>73</sup>

Selain semakin meningkatnya ketegangan antara Cina, dengan Vietnam dan Filipina, konflik di LCS juga menghadirkan nuansa baru yaitu semakin meningkatnya ketegangan antara AS dengan Cina. Sejak tahun 2010, LCS sudah mulai menjadi perluasan strategi yang akhirnya membawa Cina dan AS sama-sama ingin memiliki dominasi di perairan. Bagi AS, ide pemikiran meningkatnya kekuatan baru Cina yang nantinya akan melahirkan ketakutan dan ketidakstabilan serta bisa menyulut konflik teritorial harus menjadi bagian dalam pengembangan strategi AS di Asia Pasifik. Semakin meningkatnya penyebaran pengaruh Cina adalah sesuatu yang dalam pandangan AS tidak bisa diakomodasi, karenanya AS di bawah pemerintahan Barack Obama secara terang - terangan untuk menyampaikan penolakannya. Dalam menandingi semakin meningkatnya kekuatan Cina di kawasan,

<sup>72</sup> Diskusi dengan peneliti senior CSIS, Shibuya Jepang, 15 Juli, 2014.

<sup>73</sup> Fenna Egberink, 1 Juli 2011. "Indonesia Mediate the South China Sea Dispute?", The Netherlands.

AS bahkan sudah membendung semakin meningkatnya ketegangan di kawasan Pasifik Barat dengan secara terang-terangan menunjukkan kepentingan AS di LCS dan meningkatkan hubungan keamanan dengan sekutu dan para pendukung.<sup>74</sup>

### **Amerika Serikat dan Konflik Laut Cina Selatan**

Amerika Serikat (AS) melibatkan diri dalam sejarah yang cukup panjang pada konflik dan peperangan yang terjadi di Kawasan Timur Tengah dan di Afganistan seperti dalam konflik berkepanjangan yang terjadi antara Arab dan Israel serta dalam peperangan melawan terorisme. Dalam tahun terakhir ini AS juga sangat memperhatikan kawasan Asia terutama dalam strateginya untuk merespon kebangkitan dari Cina. Terutama sekali sejak naiknya Barack Obama sebagai presiden, persoalan yang terjadi di Laut Cina Selatan menjadi perhatian utama bagi AS bahkan menjadi fokus poin bagi AS dalam strateginya yang dikenal dengan *Asia's Rebalancing*. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pidatonya di East West Center Hawaii bahwa:

*Masa depan AS sangat berhubungan dengan Asia Pasifik dan masa depan kawasan juga akan sangat tergantung pada peran AS. Dengan demikian AS harus memperkuat kehadirannya di Asia Pasifik terutama sekali dalam kekuatan maritim.*<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Mark Lander dan Sewell Chan, 2010. Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies. New York Times, 25 Oktober 2010.

<sup>75</sup> Menlu AS, Hillary Clinton, East West Center

Mulai intensnya AS untuk melibatkan diri di kawasan Asia menunjukkan bahwa secara strategis, politik dan ekonomi, AS tidak bisa melepaskan diri dari Asia. AS dibawah Obama tidak pernah menurunkan perhatiannya pada kawasan yang diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggal dalam dua puluh tahun ke depan, serta menjadi kawasan yang penuh tantangan bagi AS, dalam artikel politik luar negerinya yang sangat berpengaruh, Hillary Clinton menjelaskan bahwa kembalinya perhatian strategis AS ke kawasan Asia sangat sesuai dengan logika keseluruhan dari usaha global untuk menyelamatkan kepemimpinan global AS.<sup>76</sup>

Keputusan Amerika untuk membentuk poros diplomasi dan militer di kawasan Asia Pasifik sudah ditunjukkan terutama sekali terhadap Beijing, sebagai respon terhadap meningkatnya ambisi kawasan Cina. Ada dua prinsip kepentingan AS dalam konflik LCS yakni Akses dan stabilitas. Pertama, AS memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga akses pelayaran yang tanpa hambatan di perairan LCS. Dari pandangan Washington, semua negara sangat membutuhkan dan akan menikmati adanya kebebasan kelautan yang tinggi, termasuk kebebasan pelayaran. Adapun alasan kenapa

---

Honolulu, Hawaii. 14 January 2010. dalam Ralf Emmers, The US rebalancing strategy: Impact on the South China Sea. National Security College, Australian National University.

<sup>76</sup> Hillary Clinton, America's Pacific Century, Foreign Policy November 2011.

kebebasan pelayaran tanpa hambatan ini dianggap penting bagi AS karena : dalam satu sisi hal ini mendukung dinamika ekonomi di kawasan yang didasarkan pada perdagangan internasional intra-regional. Kemudian dalam sisi yang lain, tiadanya hambatan dalam pelayaran akan memudahkan AS dalam menyediakan jaminan keamanan dan kekuatan militer tidak hanya di kawasan Asia tapi juga di seluruh belahan dunia.

Kedua, AS memiliki kepentingan terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sama halnya seperti kebebasan pelayaran, keamanan dan stabilitas juga akan menjadi penopang utama kesejahteraan baik di Asia dan Amerika. Bagi AS kalau kawasan ini dilanda konflik maka hal ini akan menghambat dan menjauhkan warga dari kesejahteraan karena akan melangkakan sumberdaya, menurunnya volume perdagangan dan investasi intra-regional.

Meskipun mendapatkan penekanan pada era Obama, pada kenyataannya kebijakan AS mengenai LCS sudah dicanangkan dan mengalami evolusi sejak pertengahan tahun 1990-an. Artikulasi dari kebijakan AS ke LCS sejak terjadinya ketegangan yang terjadi setelah Cina menduduki dan melakukan perusakan terumbu karang pada tahun 1994. Kemudian sejak tahun 1995 dicanangkanlah lima elemen dari politik luar negeri AS berkenaan dengan konflik LCS. Kelima

elemen tersebut adalah:

1. *Peaceful resolution of disputes* (Penyelesaian persengketaan secara damai): dengan keras AS menentang penggunaan ancaman dan kekuatan dalam menyelesaikan pertentangan klaim dan mengajak semua negara yng melakukan klaim untuk selalu menahan diri dan menghindari aksi-aksi yang mengganggu kestabilan.
2. *Peace and stability* (Perdamaian dan kestabilan): AS memiliki kepentingan yang mutlak dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan.
3. *Freedom of navigation* (kebebasan pelayaran): menjaga keselamatan dan kebebasan dalam pelayaran adalah kepentingan yang fundamental bagi AS. Pelayaran yang tanpa hambatan bagi seluruh kapal-kapal dan pesawat di LCS adalah sangat penting bagi perdamaian dan kesejahteraan keseluruhan kawasan Asia Pasifik termasuk AS.
4. *Neutrality in disputes* (sikap netralitas dalam persengketaan): AS tidak akan mengambil posisi dalam pencarian dasar hukum dalam klaim terhadap kedaulatan atas gugusan kepulauan, terumbu, pulau karang dan gundukan di LCS.
5. *Respect of international principles* (menjunjung tinggi prinsip-prinsip internasional): secara seksama AS akan selalu melakukan pemantauan terhadap klaim-klaim yang dilakukan oleh negara

yang bersengketa yang tidak konsisten dengan hukum internasional termasuk UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982.<sup>77</sup>

Pada tahun 2010, ada agenda perluasan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh AS mengenai persoalan yang terjadi di LCS, sebagai antisipasi terhadap semakin meningkatnya ketegangan yang terjadi antara negara-negara yang memiliki klaim persengketaan.<sup>78</sup> Platform bagi artikulasi dari kebijakan baru AS ke LCS adalah pertemuan tahunan *Asian Regional Forum* pada bulan Juli 2010. Pada saat pertemuan tertutup dengan sekitar dua belas negara AS mengekspresikan perhatiannya pada semakin meningkatnya ketegangan di LCS. Menteri Luar Negeri AS Hilary Clinton juga memberikan pernyataan publik dari posisi AS yang akan memberi perhatian terhadap persoalan tersebut. Dalam pernyataannya, Hillary Clinton meyakinkan beberapa elemen utama dari kebijakan AS yang sudah di canangkan sejak tahun 1995, termasuk *freedom of navigation*, penolakan terhadap penggunaan ancaman dan kekuatan bagi pihak yang bersengketa serta sikap netral AS dari persaingan dan klaim negara-negara yang bersengketa. Kebijakan AS ke LCS yang merupakan kelanjutan dari

kebijakan tahun 1995 seperti dinyatakan oleh Hillary adalah:

1. Menyelesaikan segala persengketaan tanpa koersi.
2. Dukungan terhadap kolaborasi proses diplomasi bagi seluruh negara yang memiliki klaim wilayah. Termasuk niat baik untuk memfasilitasi inisiatif dan *confidence building measures* yang konsisten dengan (*Declaration on the Code of Conduct*) tahun 2002.
3. Dukungan terhadap pengajuan keseluruhan *Code of Conduct*.
4. Keyakinan bahwa legitimasi dari klaim wilayah perairan di LCS semestinya diperoleh semata-mata dari legitimasi klaim dari fitur tanahnya.

Secara keseluruhan, pernyataan Hillary menekankan pada penerimaan secara luas terhadap prinsip-prinsip internasional yang harus diterapkan dalam penanganan persengketaan.

### **Uni Eropa dan Konflik Laut Cina Selatan**

Kawasan LCS memiliki beberapa arti penting Bagi Uni Eropa karena: LCS adalah rute perairan yang terluas setelah Mediteranian dan menjadi pintu utama bagi jalur perdagangan menuju dan dari Asia Timur, yang disinyalir merupakan 25% dari transit kargo laut. Wilayah perikanan yang menjanjikan secara ekonomi, dan potensial

<sup>77</sup> M. Taylor Fravel, 2012. *South China Sea: What Issues and Whose Core Interest?* Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA USA. Hal. 4.

<sup>78</sup> Lihat misalnya, Jeffrey A Bader, *Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia Strategy*. (Washington, DC: Brookings).

akan hidro karbon, seperti digambarkan dalam tabel 1. dibawah.

**Tabel 1**  
Minyak dan Gas di Negara-negara  
Laut Cina Selatan

Negara	Cadangan Minyak/ milyar barrel	Cadangan Gas/ trilyun kubik	Produksi Minyak/ ribuan barrel/hari	Produksi Gas/ meter kubik/hari
Brunei	1,1	13,8	203,5	366
China	16	80	3.864,4	1.960
Malaysia	4,0	83	750,8	2.218
Filipina	0,14	3,5	25,2	88
Taiwan	0,01	22	1,0	28
Thailand	0,5	1,7	186,9	858
Vietnam	0,6	6,8	344,6	162
Jumlah	21,97	184,2	5.186,4	4.680

Sumber : Energi Information Administration, 2008. *Country Anaysis Brief: South China Sea*. Hal. 6.

Kemudian bagi UE, kawasan perairan LCS juga memiliki kerentanan yang tinggi sebagai akibat dari tumpang tindihnya isu dalam klaim persengketaan dan banyaknya insiden yang dengan cepat bisa mengganggu stabilitas kawasan, seperti Nampak dalam tabel 2. di bawah. Adapun insiden yang juga menunjukkan kerentanan ketegangan di kawasan perairan LCS Nampak seperti di tunjukan dalam tabel 3.

**Tabel 2**  
Klaim negara atas wilayah  
Laut Cina Selatan

Negara	Laut China Selatan	Kepulauan Spratly	Kepulauan Paracel	Teluk Thailand
Brunei	UNCLOS	Tanpa Klaim Formal	Tidak	Tidak Mungkin
Kamboja	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	UNCLOS
China	Semua	Semua	Semua	Tidak Mungkin
Indonesia	UNCLOS	Tidak	Tidak	Tidak Mungkin
Malaysia	UNCLOS	3 Pulau	3 Pulau	UNCLOS
Philipina	Sebagian Penting	8 Pulau	Tidak	Tidak Mungkin
Taiwan	Semua	Semua	Semua	Tidak Mungkin
Thailand	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	Tidak Mungkin	UNCLOS
Vietnam	Semua	Semua	Semua	UNCLOS

Sumber : Energi Information Administration, 2008. *Country Anaysis Brief: South China Sea*. Hal. 2.

**Tabel 3**  
Insiden Bersenjata di Laut  
Cina Selatan sejak 1970-2002

Waktu	Negara	Aksi Militer
1974	Cina-Vietnam	Cina ambil alih Paracel dari Vietnam, dengan 18 tentara terbunuh dalam pertempuran di sebuah pulau
1988	Cina-Vietnam	Terjadi insiden antara Angkatan laut Cina dan Vietnam di karang Johnson di Spratly, kapal Vietnam ditenggelamkan dan 70 nelayan Tewas.
1992	Cina-Vietnam	Vietnam menuduh Cina mendaratkan pasukan di karang Da Luc. Cina merampas hampir 20 kapal kargo Vietnam yang membawa barang dari Hongkong sejak bulan Juni sampai September
1994	Cina-Vietnam	Terjadi konfrontasi angkatan laut antara Cina dan Vietnam dimana Vietnam secara internasional mengakui perairan internasional atas eksplorasi minyak di perairan Tu Chinh blok 133,134 dan 135. Sementara Cina mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayah mereka. (Blok Wan'Bei-21)

1995	Cina-Filipina	Cina menuduh Filipina mencuri karang. Militer Filipina menyerang orang-orang Cina pada bulan Maret dan menghancurkan simbol-simbol Cina.
1995	Taiwan-Vietnam	Pasukan artileri Taiwan menembaki kapal suplai Vietnam.
1996	Cina-Filipina	Bulan Januari kapal Cina terlibat kontak senjata selama 90 menit dengan angkatan laut Filipina dekat pulau Capone sebelah barat Luzon, Utara Manila.
1997	Cina-Filipina	Bulan April, angkatan laut Filipina perintahkan speedboat Cina dan dua kapal nelayan untuk meninggalkan laut dangkal Scarborough. Kemudian Filipina pindahkan patok-patok Cina di dan mengibarkan benderanya. Cina membalas dengan pengiriman tiga kapal perang untuk investigasi
1998	Filipina-Vietnam	Bulan Januari tentara Vietnam kontak senjata dengan perahu ikan Filipina dekat Karang Pigeon

1999	Cina-Filipina	Bulan Mei perahu nelayan Cina ditenggelamkan dengan ditabrak oleh kapal perang Filipina, bulan Juli kapal Cina yang lain ditenggelamkan
1999	Cina-Filipina	Kapal perang Cina dituduh melecehkan angkatan laut Filipina dekat kepulauan Spratly.
1999	Filipina-Vietnam	Bulan Oktober, tentara Vietnam menembaki pesawat angkatan udara Filipina dalam patrolinya di Spratly.
1999	Malaysia-Filipina	Bulan Oktober, sumber pertahanan Filipina melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filipina mengintai di Spratly.
2000	Cina-Filipina	Bulan Mei pasukan Filipina adu tembak dengan nelayan Cina 1 meninggal, 7 ditahan.
2001	Cina-Filipina	Selama 3 bulan pertama, angkatan laut Filipina mengusir 14 kapal berbendera Cina dari Spratly.
2001	Cina-Filipina	Filipina mengirimkan perahu bersenjata ke laut dangkal Scarborough untuk membatasi Cina meningkatkan struktur bebatuan.

2002	Filipina-Vietnam	Bulan Agustus pasukan Vietnam memberi peringatan pada militer Filipina yang berpatroli di sekitar Spratly.
------	------------------	--

Sumber : Energi Information Administration, 2008. *Country Analysis Brief: South China Sea*. Hal. 5-6.

Bagi UE kawasan perairan LCS juga memiliki sensitivitas militer, dan hal ini ditunjukkan dengan kehadiran angkatan laut AS, dan peningkatan kapabilitas militer Cina dan Vietnam.<sup>79</sup>

UE menunjukkan perhatian yang meningkat seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan dikawasan dan meningkatnya rivalitas Cina dan AS. Titik awal mulai intensnya UE di kawasan Asia dimulai dengan kehadiran perwakilan tinggi untuk urusan kebijakan luar negeri dan keamanan Catherine Ashton dalam *ASEAN Regional Forum*. Dalam kesempatan keberadaannya di Asia, Ashton juga menanda tangani *Treaty on Amity and Cooperation* di Asia Tenggara, yang membawa konsekuensi semakin dekat dan potensialnya negara-negara UE untuk menjadi anggota dari EAS. Lebih dalam lagi UE juga mengeluarkan *joint statement* dengan AS berkenaan dengan kawasan Asia-Pasifik yang mendesak Cina dan ASEAN untuk menetapkan *Code of Conduct* yang berkenaan dengan persengketaan wilayah

perairan di LCS dan menyelesaikan persengketaan tersebut dengan cara yang damai. *Joint statement* juga ditujukan demi pentingnya hukum internasional terutama UNCLOS, dan *confidence building measures*. Hal ini senada dengan pandangan UE terhadap persoalan LCS yang pernah dikeluarkan yakni:

1. UE meyakini bahwa pertikaian teritorial harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional melalui cara damai dan kerjasama.
2. Mendukung peraturan-peraturan yang didasarkan pada sistem internasional (UNCLOS) dan *liberty of navigation*. Meyakinkan bahwa ketegangan akan sangat merugikan perdagangan dan investasi dan Perlunya perhatian untuk *energy security*.
3. Mengajak semua pihak untuk memperjelas dasar dari tuntutan atau klaim mereka.<sup>80</sup>

Perubahan yang nyata dari sikap UE sejak dicanangkannya pembaharuan dalam garis besar kebijakan luar negeri dan keamanan UE di Asia Timur adalah UE semakin menunjukkan peran sertanya dalam persoalan keamanan di Asia. Meskipun Nampak secara kasat mata bahwa hal ini dikarenakan kuatnya ajakan yang dilakukan oleh AS disertai peringatan bahwa kawasan Asia kini menjadi semakin penting

<sup>79</sup> Dr. Fraser Cameron, *The South China Sea disputes: European Union Perspective*. EU-Asia Centre, Brussels.

<sup>80</sup> Dr. Fraser Cameron, *ibid.*



dan semakin membutuhkan pertimbangan keterlibatan UE.<sup>81</sup>

Semakin meningkatnya perhatian yang diberikan UE terhadap kawasan Asia bukanlah sesuatu tanpa dasar. Kalau diperhatikan dinamika yang terdapat dalam perjalanan Eropa sampai menjadi sebuah komunitas yang solid seperti sekarang ini tentunya banyak sekali pengalaman dan kejadian yang terjadi di Eropa dan bisa bermanfaat atau menginspirasi bagi pengutan komunitas di Asia pada umumnya dan penyelesaian persoalan di LCS. Seperti misalnya:

1. Pengalaman UE dalam meluncurkan *common fisheries policy* (CFP) dan penentuan kuota bagi negara anggota.
2. Pengalaman dalam penyelesaian sengketa yang terjadi seperti: *Arctic, Barents, Baltic, North Atlantic, Mediterranean, Aegean* dan *Baltic Sea*.<sup>82</sup>

Dari pemaparan mengenai pandangan umum kebijakan UE ke Asia serta pengalaman yang menyertai perjalanan UE hingga menjadi komunitas yang paling terintegrasi seperti sekarang ini, maka bisa di telusuri bahwa dasar kebijakan dan respon yang nantinya akan diberikan UE terhadap persoalan yang terjadi di LCS

adalah berkisar pada lima elemen yang penting: UE akan selalu mengajak dan mengedepankan penyelesaian konflik LCS dengan cara yang damai, berkaca dan mengikuti pola-pola yang berlangsung dalam pengalaman UE, bisa menggunakan pihak ketiga yang sifatnya membantu dalam proses penyelesaian sengketa, melibatkan secara bersama semua pihak dalam penyelesaian sengketa, dan mengingatkan bahwa mekanisme penyelesaian jangka panjang adalah resolusi yang membuka terjadinya pembangunan bersama.

### **Indonesia dan Konflik Laut Cina Selatan**

Keterlibatan negara Indonesia dalam manajemen konflik di LCS, adalah sesuatu yang didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut, usaha untuk menemukan dan mencegah timbulnya penyebab konflik, keyakinan akan kapasitas yang tersedia, serta pilihan yang dirasa tepat mengenai mekanisme penyelesaian konflik.<sup>83</sup>

Kalau dilihat dari asas manfaatnya, pencapaian sebuah resolusi konflik bagi persoalan Laut Cina Selatan tidak saja bermanfaat secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Besarnya

<sup>81</sup> Frans Paul Van der Putten, 2013, *The European Union and Decreasing Regional Stability in East and South East Asia*. Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Hal. 3.

<sup>82</sup> Dr. Fraser Cameron, op.cit.

<sup>83</sup> Lihat misalnya, Alan C. Tidwell, 1998, *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York, Continuum, hal.3-8.

potensi ekonomi seperti: jalur pelayaran, kandungan alam seperti minyak, gas dan mineral serta kekayaan ikannya kalau bisa dimanfaatkan dan dikelola akan sangat bermanfaat bagi setiap negara yang terlibat. Maka dari itu hipotesisnya adalah: penyelesaian konflik akan memiliki manfaat yang sangat signifikan tidak saja bagi masyarakat Laut Cina Selatan tetapi juga bagi Indonesia dan dunia internasional. Paling tidak ada dua hal yang mendapat pertimbangan Indonesia dalam asas manfaat ini.

*Pertama*, Indonesia harus selalu mewaspadaai situasi keamanan di Laut Cina Selatan yang sering di jadikan sengketa oleh beberapa negara di kawasan. Konflik di kawasan akan mempengaruhi kondisi keamanan karena secara geografis letak Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara yang terlibat sengketa. Konflik juga akan mempengaruhi Secara ekonomi, karena selain letak Indonesia yang secara geografis sangat dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wilayah itu juga salah satu jalur lintas ekonomi internasional, dimana ekspor impor Indonesia melewati jalur tersebut.<sup>84</sup>*Kedua*, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat Internasional, merasa perlu dan segera menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian masalah Laut

Cina Selatan. Karena dengan cara inilah Indonesia dapat menunjukkan partisipasinya dalam menjaga perdamaian dunia yang dimulai dengan menciptakan perdamaian di dalam negeri dan di kawasan.<sup>85</sup>

Beranjak dari asas manfaat diatas, maka langkah selanjutnya yang harus dikedepankan dan sudah saatnya perlu dilakukan adalah pendalaman mengenai apa yang menjadi sumber konflik Laut Cina Selatan. Pada kenyataannya, tidak ada penyebab konflik yang tunggal sehingga perlu diadakan pencarian terhadap penyebab konflik yang dominan. Kalau memang mau dirunut atau di petakan (*conflict mapping*)<sup>86</sup>, sumber konflik di Laut Cina Selatan yang sangat potensial menjadi konflik terbuka adalah beragam, meskipun bisa di lansir beberapa sumber dominan dari konflik tersebut adalah nilai ekonomi yang kemudian berkembang menjadi tuntutan sejarah antara Cina, Taiwan dan Vietnam dalam sengketa kepulauan Spratly, dan tuntutan modern seperti misalnya kedaulatan (yang menjadi dasar klaim semua pihak).<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Bandingkan misalnya dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia: Presiden: Indonesia Waspadaai Situasi Laut Cina Selatan. Kamis 22 Juli 2010.

<sup>85</sup> Bandingkan dengan pandangan Michael E Brown, 1996. *The International Dimension of Internal Conflict*, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.

<sup>86</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tow Woodhouse. 1999, *Contemporary Conflict Resoluton*. Polity Press, Cambridge, UK. Hal.91.

<sup>87</sup> Berkaitan dengan tuntutan diatas, ada kepentingan untuk menggunakan pulau-pulau dan wilayah perairan di kawasan untuk memperluas territorial perairan. Perbedaan Kepentingan Nasional, yang pada akhirnya tidak terpenuhi, kemudian menimbulkan suatu kondisi apa yang diistilahkan sebagai "deprivasi" nasional. Lihat misalnya, Ted Robert Guur, *Why Men Rebel*, 1970, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

Dalam kaitannya dengan kapasitas, niat, dan kesempatan, rasanya terlalu naif untuk mengatakan bahwa usaha untuk mulai menapak jalan menuju penyelesaian konflik Laut Cina Selatan yang dilakukan Indonesia tidak didukung kapasitas yang memadai. “*Workshop on managing Potential Conflict in the South China Sea*” yang diselenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengelola potensi konflik di kawasan laut Cina Selatan melalui upaya pengembangan *Confidence Building Measures*, mendorong diskusi dan dialog antar negara yang memiliki sengketa wilayah laut dan menjajaki berbagai kemungkinan dan cara bekerjasama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama,<sup>88</sup> sudah menjadi bukti kapasitas yang dimiliki Indonesia sebagai *front leader* menuju penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan.

Ditambah lagi dengan pengalaman Indonesia yang diwarisi konflik dengan isu pemisahan yang sudah akut dan panjang yaitu Aceh, akan menjadi modal kuat untuk selalu menjadi inisiator penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Sebagai bahan bandingan, kasus penyelesaian Aceh adalah sebuah jalan panjang dan berliku. *The Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)* yang dinegosiasikan tahun 2002 dengan bantuan *Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue* yang bermarkas di

Jenewa tidaklah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Baru setelah bencana tsunami dan gempa bumi 2004 pemerintahan SBY dengan gerakan Aceh Merdeka (GAM) melaksanakan pembicaraan perdamaian kali ini di Helsinki yang dimediasi oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Puncak dari pembicaraan perdamaian tersebut adalah ditandatanganinya perjanjian perdamaian dalam bentuk *code of conduct* pada tahun 2005, yang akhirnya menjadi landasan untuk penyelesaian konflik dan terciptanya perdamaian di Aceh. Keberhasilan yang dicapai dalam menangani Aceh menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai dalam menyelesaikan konflik.<sup>89</sup> Semakin nyata keberhasilan yang di panen di Aceh akan menjadi semakin kuat keyakinan akan kapasitas yang ada dan itikad baik yang ada untuk memberikan perhatian, kemudian merintis jalan bagi perdamaian di Laut Cina Selatan.

Selain Indonesia sebagai *front leader*, kapasitas lain yang tersedia bagi penyelesaian konflik adalah ASEAN, dan terbentuknya *Asian Regional Forum (ARF)*. *Asian Regional Forum (ARF)*: 22 negara terlibat dalam keamanan kawasan Asia Pasifik, termasuk seluruh anggota ASEAN) sudah melaksanakan diskusi

<sup>88</sup> Tabloid Diplomasi, November 2010, Op.Cit

<sup>89</sup> Lihat misalnya, Blair A. King. Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity, Council of Foreign Relations Press. 2006.

tentang Laut Cina Selatan. Cina sebagai anggota dari ARF mengajukan bahwa dulu pertikaian teritorial harus diselesaikan melalui jalur bilateral. Negara lainnya anggota ARF seperti Amerika Serikat, mengajukan bahwa seluruh anggota ARF memiliki kepentingan terhadap isu-isu yang mempengaruhi keamanan dan perdamaian di kawasan. Dan karenanya ARF menjadi layak untuk mendiskusikan segala isu tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar menyatakan kepercayaan beliau bahwa isu teritorial ASEAN hanya didialogkan di tingkat asia dan tidak dalam forum internasional.

Mengenai itikad baik (*good will*), dimana pada tahun 1996 dimana menteri-menteri negara ASEAN menyetujui kebutuhan akan “*Code of Conduct*” bagi Laut Cina Selatan yang memungkinkan aktifitas penelitian ilmiah, penghentian pembajakan, memberantas jalur narkoba tanpa mengganggu isu kedaulatan, dan momen pada bulan November 2002, dimana Cina dan 10 negara anggota ASEAN menandatangani *joint declaration* untuk sepakat menyelesaikan segala pertikaian yurisdiksi dan teritorial mereka dengan cara-cara yang damai sudah mengindikasikan begitu kuatnya tekad bahwa negara-negara yang terlibat konflik dan Indonesia sebagai inisiator akan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas dasar niat yang tulus dengan berani

mengambil segala bentuk resiko demi perbaikan. Lebih jauh lagi, tidak ada jalan yang lebih baik bagi pemerintah selain menunjukan pada dunia bahwa pemerintah Indonesia memang memiliki niat yang bulat untuk dapat melakukan reformasi dan mengedepankan cara-cara demokratis dalam menangani persoalan di kawasan.

Berkenaan dengan kesempatan, rasanya Indonesia sudah mengambil dan memanfaatkan hampir semua kesempatan yang ada di depan mata. Selama dua puluh tahun terakhir memang sudah terjadi penurunan dalam intensitas insiden yang melibatkan kekuatan militer dalam konflik di Laut Cina Selatan. Artinya kondisi yang berkembang memang sangat kondusif bagi Indonesia dan seluruh negara yang terlibat untuk selalu membuka jalur komunikasi dan meretas jalan menuju pada pemilihan mekanisme yang nantinya bisa dijadikan formulasi bagi resolusi yang akan menyelesaikan konflik pada akar untuk menghindarkan segala bentuk eskalasi yang merugikan semua pihak. Dalam sisi lain, demokratisasi yang kini mulai tumbuh di kawasan akan menjadi kesempatan emas, bisa dijadikan landasan setiap pihak merintis jalan untuk masalah Laut Cina Selatan.<sup>90</sup>

Berkenaan dengan hal mekanisme

---

<sup>90</sup> Simon, Patrice Morin. Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua's Case. Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, “Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective” Brussels, 7 December 2006. hal. 6-7.

yang ditetapkan dalam peranan Indonesia untuk konflik LCS, Indonesia menginisiasi dua mekanisme yang kini sudah berjalan yaitu negosiasi dengan penekanan pada dialog, dan kemungkinan keterlibatan mediasi oleh pihak ketiga. Beberapa mekanisme yang kini sudah ada dalam meningkatkan dialog seperti dilaporkan *United State institute of Peace* adalah:

(1). *South China Sea Informal Meeting*: adalah pertemuan informal yang digagas Indonesia “*Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*” yang dimulai di Bali 1990. Pertemuan telah dihadiri oleh perwakilan pemerintah dalam kapasitas pribadi dan keahlian mereka dalam aspek kerjasama maritim, keamanan dan pengembangan sumber daya di Laut Cina Selatan. Cina dan Taiwan juga mengirimkan perwakilan sejak tahun 1991.

Hasil nyata yang dicapai dari workshop yang diprakarsai Indonesia ini adalah di cetuskannya “*technical working groups*” dalam menangani: isu-isu ilmiah perairan, keamanan jalur navigasi, pelayaran, dan komunikasi, serta persoalan hukum yang terkait. Kelompok kerja teknis ini bertujuan untuk menentukan wilayah kerjasama dan kontak antar pihak yang bertikai, meskipun tidak menyentuh persoalan yang menyangkut kedaulatan (CBM), juga sudah menjadi agenda dari workshop, yang sudah berhasil dalam melahirkan ide-ide meskipun sedikit konsensus tentang bagaimana CBM akan

diimplementasikan/dipraktekkan.

(2). *Creation of an Eminent Person Group*: sudah diajukan bahwa untuk menciptakan terobosan politik harus ada landasan bagi *substantive official negotiations*. *Eminent Person Group* dibentuk sebagai pendukung bagi Workshop yang diprakarsai Indonesia. Perwakilan dari negara ASEAN yang tidak terlibat dalam konflik (*claimants*) seperti Singapura Indonesia dan Thailand) bisa dilibatkan sebagai mediator diantara pihak yang berkonflik. Cina akan menolak keras formulasi ini selama kepentingannya dipertentangkan dengan blok ASEAN. Pada intinya harus dilibatkan pihak yang kompeten dari perwakilan masing-masing negara dan dari sini diharapkan dialog politik menjadi semakin terbuka.

(3). *Third Party Mediation*: kalau terjadi perselisihan dan pihak yang terlibat ingin menyelesaikan perselisihannya, biasanya di bawa ke *International Court of Justice* (ICJ). Akan tetapi harus diakui juga bahwa dengan sedemikian kompleksnya hal perselisihan dalam konflik Laut Cina Selatan maka peran ICJ juga menjadi semakin sulit. Ditambah lagi dengan posisi Cina yang akan menolak penyelesaian ICJ karena hal ini sama saja dengan meng-internasionalisasi konflik serta menurunkan posisinya dengan pihak yang lain. Sehubungan dengan kondisi ini, Professor Ji Guoxing dari Shanghai Institute of International Studies “*ad hoc tribunal*” atau “*non-official third part*”, yang

nantinya akan bisa memainkan peranan yang penting tanpa harus meng-institusionalisasi proses negosiasi atau menginternasionalisasi perselisihan. Model ini sudah berhasil dalam *the Iceland Continental Shelf Agreement* dan menyelesaikan pertikaian antar Cili dan Argentina mengenai *Beagle Channel*.

(4). *Creation of Joint Resource Development Authority*: Ide untuk menata klaim sepihak atas dasar kedaulatan menuju pada persetujuan *Joint Resource Development* sudah diartikulasikan dalam banyak kesempatan oleh perwakilan Cina. Akan tetapi konsep yang diajukan Cina nampaknya mengacu pada mekanisme kerjasama bilateral, sementara anggota ASEAN lebih mengedepankan skema multilateral. Mekanisme hanya akan memberi keuntungan bagi klaim Cina di daerah yang disengketakan, yang pada akhirnya tidak akan membuka partisipasi Cina untuk menuju pada penyelesaian. Ide menuju *joint resource development* sudah diajukan dalam beragam format, termasuk bagian dalam workshop yang digagas Indonesia. Peneliti di *East West Center* dari Universitas Hawaii Mark Valencia John Van Dyke dan Noel Ludwig sudah mengembangkan beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan menjadi bagian dari *Joint Resource Development authority* yang menyerupai *Antarctic treaty*. *The Minor Gap Treaty* antar Australia dan Indonesia, *Persian Gulf Agreement*, menyediakan

banyak contoh dan preseden yang bisa dipertimbangkan dalam pendekatan ini. Kemudian *a multilateral maritime development authority* jika diterapkan akan menjadi yang pertama.

(5). *Multilateral Talks between ASEAN and PRC*. Masuknya Vietnam ke ASEAN tahun 1995, dan solidaritas dari anggota ASEAN mendukung Filipina dalam persoalan karang, sudah membuat pendekatan ASEAN terhadap persoalan Laut Cina Selatan menjadi terkoordinasi.

Profesor David Denoon dan Steven Brams dari Universitas New York mengajukan teknik matematik yang dinamakan "*fair division*" bisa digunakan untuk memfasilitasi negosiasi antar negara yang berdaulat. Mereka menyarankan dua tingkatan negosiasi pertama antar Cina dan ASEAN, kedua antar Cina dan anggota ASEAN.

(6). *Resolving Bilateral Issues First, then Pursuing Multilateral Negotiations*:

Asosiasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sudah muncul sebagai forum bagi dialog antar negara-negara yang terlibat klaim dalam persoalan di Laut Cina Selatan. Meskipun ASEAN tidak ikut menyertakan Cina dan Taiwan, banyak kelompok kerja dengan Cina dan Taiwan sudah diselenggarakan berkenaan dengan isu-isu potensial untuk menjalin hubungan yang penting untuk menyelesaikan isu-isu pertentangan di kawasan. Indonesia menjadi tuan rumah dialog workshop

pertama tahun 1990 dan sejak itu mengambil peran utama dalam inisiatif diplomatik dan persetujuan kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu di Laut Cina Selatan.

Pada tahun 1996 para menteri-menteri negara ASEAN menyetujui kebutuhan akan “*Code of Conduct*” bagi Laut Cina Selatan yang memungkinkan aktifitas seperti misalnya penelitian ilmiah, penghentian pembajakan, memberantas jalur narkoba tanpa mengganggu isu kedaulatan. Tahun 1999 *draft code of conduct* umum Vietnam dan Filipina disepakati dalam ASEAN Summit. Bulan November 2002, Cina dan 10 negara anggota ASEAN menandatangani *joint declaration* untuk sepakat menyelesaikan segala pertikaian yurisdiksi dan teritorial mereka dengan cara-cara yang damai. Sebuah hasil nyata yang terealisasi adalah: Malaysia dan Brunei melaksanakan pertemuan berkenaan dengan klaim mereka mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, namun belum ada kesepakatan. Sejak tahun 2005, Cina melalui *China National Offshore Oil Cooperation*, (CNOOC), Filipina melalui *The Philippine National Oil Company*, dan Vietnam melalui *Petro Vietnam*. Sudah bekerja bersama untuk melakukan kajian menyeluruh di area seluas 55 ribu hektar termasuk kepulauan Sprately. Proyek yang menelan dana 15 juta dolar tersebut ditalangi secara bersama dan keterbukaan informasi pun berlangsung terjadi antara

perusahaan.<sup>91</sup>

### **Politik Luar Negeri RI terhadap Amerika dan Eropa Terkait Isu Laut Cina Selatan**

Dalam politik luar negerinya, Indonesia selalu berusaha menampilkan hal yang terbaik dalam pengertian bahwa harus selalu dapat memberikan respon dengan baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam situasi global.<sup>92</sup> Hal ini karena adanya kesadaran bahwa eksistensi Indonesia dalam pergaulan global hanya dapat bertahan jika dalam perumusan politik luar negerinya selalu memberikan perhatian terhadap konteks internasional,<sup>93</sup> karena hal inilah yang menjadi pembuktian bahwa Indonesia memang selalu bebas dan aktif dalam pergaulan dunia dan selalu berkontribusi dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi dunia internasional. Dengan demikian tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa transformasi dalam bidang lokasi dan aktifitas, fokus kegiatan, dan transformasi pada bidang dimensi instrumen sudah terjadi dalam politik luar negeri Indonesia. Kibaran yang sudah dilakukan Indonesia dalam pergaulan internasional menunjukkan bahwa indonesia sudah melakukan

<sup>91</sup> The United States Institutes of Peace, 1996, Special Report: The South China Sea Dispute: Prospect for Preventive Diplomacy. WashingtonDC. Hal. 9-15.

<sup>92</sup> Marx Webber dan Michael Smith.2002, Foreign Policy in Transformed World.London Prentice Hall, hal 9-12.

<sup>93</sup> Fareed Zakaria. 1992. Realism and Domestic Politics, International Security. Vol. 17, no. 1, hal 179.

perluasan lokasi politik luar negerinya yang tidak lagi hanya tertuju terpusat pada Eropa maupun Atlantik. Kemudian dengan tercatatnya nama Indonesia dalam G-20 dan WTO, ini menjadi pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada isu-isu tradisional politik luar negeri yang menjamin keamanan negara seperti pada masa Perang Dingin, akan tetapi sudah melakukan transformasi dan menempatkan perhatian pada isu perekonomian global (kebutuhan akan regulasi perdagangan dan keuangan). Selanjutnya, Indonesia juga sudah melakukan transformasi instrumen dalam politik luar negerinya yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu menolak segala jenis penggunaan kekerasan atau kekuatan dalam penyelesaian perselisihan internasional, akan tetapi selalu mengedepankan cara-cara diplomasi yang damai dengan dukungan *soft power* seperti nilai, norma, identitas budaya.<sup>94</sup> Ketiga transformasi yang sudah teretas dalam politik luar negeri Indonesia nantinya juga akan menjadi modal yang besar bagi Indonesia untuk mendisain politik luar negeri ke Amerika dan Eropa terutama dalam isu peran aktif Indonesia di kawasan LCS.

Indonesia itu adalah negara yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam kontribusinya terhadap persoalan di LCS karena, tidak terlibat klaim wilayah yang disengketakan, dan tidak memiliki sejarah

konflik mengenai kelautan dengan Cina seperti yang dialami Filipina dan Vietnam. Kelebihan lain yang dimiliki Indonesia adalah posisi netral yang selama ini diambil Indonesia dalam masalah LCS. Netral dalam artian bahwa Indonesia tidak pernah secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Amerika Serikat yang ingin membendung pengaruh kekuatan Cina di Kawasan. Indonesia juga tidak melakukan penolakan yang berarti terhadap pendekatan yang dilakukan Cina dalam mengimbangi kekuatan AS. Dengan modal netralitas ini, Indonesia harus memberikan perhatian khusus pada posisi AS, Cina maupun UE, dalam artian mereka harus mendapatkan prioritas dan dimanfaatkan kontribusinya dalam menuju perdamaian di kawasan.

Argumentasi mengenai perlunya hal prioritas terhadap posisi AS, Cina dan UE karena hubungan Cina, Amerika dan UE, nantinya akan memiliki porsi dan dinamika tersendiri di LCS. Sikap asertif Cina misalnya sudah membawa negara-negara anggota ASEAN yang terlibat konflik untuk selalu mulai memperhatikan persoalan keamanan dan stabilitas regional mereka. Perilaku asertif yang ditunjukkan selama ini maka akan semakin menurunkan kredibilitasnya di Asia Tenggara bahkan terbukti bahwa sikap ofensif Cina selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Meskipun negara-negara Asia Tenggara juga terlibat perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan

<sup>94</sup> Marx Webber dan Michael Smith, Op.Cit. hal. 32.



Cina, akan tetapi selama Cina bertahan dengan sikap ofensifnya maka mereka tetap meningkatkan hubungan keamanan mereka dengan AS bahkan menerima kehadiran militer AS di kawasan. Seperti ditulis oleh Tran Truong Thuy:

*Beberapa negara ASEAN kini sudah melakukan modernisasi kekuatan militernya dibawah dukungan AS untuk keseimbangan kekuatan, indikasinya AS pun semakin memiliki ruang dan kesempatan untuk terlibat di kawasan serta menancapkan pengaruhnya di LCS. Semakin meningkat kekuatan Cina maka akan semakin meningkatkan kepentingan AS di kawasan. Kepentingan dan posisi AS di LCS bahkan sudah dipertegas dalam ARF yang ke 17, 18, 19 dan yang ke 20, serta dalam East Asia Summit (EAS) tahun 2011, dan 2012.<sup>95</sup>*

Lebih jauh politik luar negeri AS di kawasan LCS sudah membawa dampak posisi negara-negara yang lainnya terutama negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Washington. Beberapa negara seperti Jepang, Australia, India bahkan Uni Eropa kini juga sudah menyatakan perhatian mereka terhadap perkembangan situasi di LCS. Untuk UE, mulai ditematkannya LCS sebagai fokus dari kebijakan luar negerinya ditunjukkan dengan diluncurkannya pembaharuan garis besar kebijakan luar negeri dan keamanan UE di Asia Timur pada bulan Juni 2012.<sup>96</sup>

UE memiliki kepentingan yang besar di LCS karena peranan besarnya dalam perdagangan dan investasi di

kawasan. Dalam *Guidelines on the EU's Foreign and Security in East Asia*, ditegaskan bahwa pentingnya kebebasan pelayaran di LCS dan mengajak semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan segala pertikaian atas dasar hukum internasional, terutama sekali United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ditegaskan juga bahwa UE akan selalu memperhatikan sejarah perkembangan dalam tubuh UE, serta akan selalu berbagi pengalaman UE dalam mengelola persoalan persengketaan wilayah perairan yang pernah terjadi di Eropa selama dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Posisi UE di LCS dipertegas dengan ditanda tangannya *joint EU – US Statement on the Asia Pacific Region* pada tahun 2012 untuk mengimbau Cina dan negara-negara ASEAN yang terlibat klaim mengacu kepada *Code of Conduct* dan menyelesaikan segala perselisihan teritorial dan perairan secara damai mengedepankan cara diplomatis dan solusi yang kooperatif.<sup>97</sup>

Pada masa yang akan datang terutama dalam menangani semakin tingginya ketegangan di LCS, Politik luar Negeri Indonesia, Indonesia semestinya harus mampu memanfaatkan keuntungan strategis yang kini dimiliki serta bagaimana Indonesia semestinya mendekati dan merangkul Amerika dan Eropa dalam isu

<sup>95</sup> Tran Truong Thuy, 2013. *Territorial Issues in Asia: Drivers Instruments, Ways Forward*. Discussion Paper, Konrad Adenauer Stiftung. Hal. 15.

<sup>96</sup> Dr. Fraser Cameron, *op.cit.*

<sup>97</sup> Dr. Fraser Cameron, *Loc.Cit.*

LCS. Dengan demikian AS dan UE harus diasumsikan sebagai aktor yang strategis dalam memuluskan peran Indonesia pada konflik LCS. Ada beberapa hal yang bisa mempermudah Indonesia untuk mencari kesepakatan dan memanfaatkan baik AS maupun UE bisa kontributif dan efektif dalam pengelolaan konflik di LCS. Pertama, persamaan pandangan mengenai cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa. Sudah dipaparkan di atas bahwa ketiga aktor Indonesia, AS dan UE, semuanya bermuara pada pandangan dan ajakan untuk selalu menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai. Kedua, posisi netralitas yang dimiliki, Indonesia, AS, dan UE sama-sama tidak memiliki sejarah konflik wilayah perairan dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik LCS terutama dengan Cina. Kemudian beberapa keuntungan nyata dari keberhasilan politik luar negeri Indonesia dalam memanfaatkan AS dan UE dalam pemeliharaan perdamaian di LCS adalah:

1. Tingginya kepentingan ekonomi dan politik AS untuk melibatkan diri di LCS akan menjadi keuntungan, baik sebagai penjaga keamanan kawasan dan membendung kekuatan Cina.
2. Posisi ketetuaan Indonesia di ASEAN akan menjadi kekuatan tersendiri dalam politik luar negeri Indonesia ke AS, karena tidak terbantahkan bahwa AS akan selalu membutuhkan dukungan ASEAN (Indonesia) sebagai legitimasi

kehadirannya di LCS.

3. Politik luar negeri Indonesia harus mampu melibatkan UE dalam berbagi terutama mengenai pengalaman menyelesaikan konflik yang terjadi baik di dalam maupun diluar UE.
4. Politik luar negeri Indonesia ke UE juga harus mampu mengajak UE berbagi mengenai keberhasilannya mengatur sumberdaya di kelautan. Pengalaman dalam perlindungan kelautan serta menegosiasikan mengenai standar lingkungan yang tinggi bagi negara-negara perairan.<sup>98</sup>

Sejalan dengan apa yang dijabarkan di atas, politik luar negeri Indonesia ke AS dan UE dalam konteks LCS kalau diistilahkan maka Indonesia harus selalu bermain cantik dalam artian mampu merangkul keduanya dan memanfaatkan kontribusinya bagi penanganan konflik di LCS. kalau hal tersebut bisa dilakukan, maka politik luar negeri akan semakin menunjukkan apa yang oleh Marx Webber dan Michael Smith, disebut Politik luar negeri yang baik, karena dapat merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi global. Kemudian keberhasilan politik luar negeri RI ke AS dan UE dalam konteks LCS akan menjadi bukti nyata dari transformasi baik dalam bidang lokasi aktivitas, fokus kegiatan, dan instrumen.

---

<sup>98</sup> Dr. Fraser Cameron, Ibid.

## Bibliography

### Buku

- Brown, Michael E. 1996. *The International Dimension of Internal Conflict*, CSIA Studies in International Security. The MIT Press, Cambridge, London. Hal 9.
- Buszynski, Leszek. 2012. *The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S. – China Strategic Rivalry*. The Washington Quarterly, Spring, 35: 2. hal. 139-156.
- Fravel, M Taylor. 2012. *South China Sea: What Issues and Whose Core Interest?* Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA USA. Hal. 4.
- Lander, Mark dan Sewell Chan, 2010. *Taking Harder Stance toward China, Obama Lines up Allies*. New York Times, 25 Oktober 2010. Miall, Hugh Oliver Ramsbotham, *Toward Woodhouse*. 1999, Contemporary Conflict Resolution. Polity Press, Cambridge, UK. Hal. 91.
- Simon, Patrice Morin. *Democracy and Conflict Resolution: Solutions to Papua's Case*. Paper dipresentasikan pada konferensi EU-Indonesia, "Pluralism and Democracy: Indonesian Perspective" Brussels, 7 Desember 2006. hal. 6-7.
- The United States Institutes of Peace, 1996, *Special Report: The South China Sea Dispute: Prospect for Preventive Diplomacy*, Washington DC. Hal 9-15. Tidwell, Alan C. 1998, *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York, Continuum, hal. 3-8.
- Thuy, Tran Truong. 2013. *Territorial Issues in Asia: Drivers Instruments, Ways Forward*. Discussion Paper, Konrad Adenauer Stiftung. Hal. 15.
- Van der Putten, Frans Paul. 2013, *The European Union and Decreasing Regional Stability in East and South East Asia*. Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Hal. 3.
- Webber, Max dan Michael Smith. 2002, *Foreign Policy in Transformed World*. London Prentice Hall, hal 9-12.
- Zakaria, Fareed. 1992. *Realism and Domestic Politics, International Security*. Vol. 17, no. 1, hal 179.

### Jurnal

- Bader, Jeffrey A. *Obama and China's Rise: An Insider's Account of America's Asia Strategy*. (Washington, DC: Brookings)
- Cameron, Dr. Fraser., *The South China Sea disputes: European Union Perspective*. EU-Asia Centre, Brussels. Egberink, Fenna. 1 Juli 2011. *Can Indonesia Mediate the South China Sea Dispute?* The Netherlands.
- Emmers, Ralf. *The Us rebalancing strategy: Impact on the South China Sea*. National Security College, Australian National University.
- Guur, Ted Robert. *Why Men Rebel*, 1970, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
- King. Blair A. *Peace in Papua: Widening a Window of Opportunity*, Council of Foreign Relations Press. 2006.